

KOMUNIKASI LINTAS AGAMA: Modal Sosial Pembentukan Masyarakat Sipil

Abdul Rozak

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah bangsa di mana masyarakatnya bercorak plural. Pluralitas tersebut ditandai dengan ciri yang bersifat horizontal maupun vertical.¹ Ciri horizontal terlihat dari adanya berbagai kesatuan sosial yang terbentuk berdasarkan perbedaan suku bangsa, adat-istiadat, budaya dan agama. Sementara ciri vertikal terbentuk akibat adanya perbedaan-perbedaan strata sosial atas dan bawah berdasarkan faktor ekonomi dan politik seperti status sosial-ekonomi kuat dan lemah, elit-penguasa dan masyarakat biasa. Stratifikasi sosial tersebut dapat dilihat

berdasarkan kemampuan dan penguasaan dalam bidang ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, dan sebagainya.

Struktur masyarakat Indonesia yang seperti itu menunjukkan dengan jelas bahwa masyarakat bangsa ini bersifat majemuk. Masyarakat majemuk, kata Furnivall sebagaimana disitir Shepsle, adalah masyarakat yang terdiri dari dua atau lebih elemen dan tatanan sosial yang hidup berdampingan tetapi tidak berintegrasi dalam satu kesatuan politik. Kemajemukan tersebut merupakan kekayaan bangsa yang sangat bernilai, namun pada sisi yang lain pluralitas tersebut dapat menjadi

hambatan yang serius bagi integrasi sosial dan pembangunan nasional. Terlebih jika stratifikasi sosial berbenturan dengan differensiasi sosial, maka konflik yang ekksesif seringkali tidak dapat dielakkan.²

Selain itu, sebagaimana diungkap oleh Ted Gurr, sebagai negara yang sedang berada dalam tahap awal demokrasi, Indonesia memiliki resiko tinggi untuk menghadapi konflik kekerasan. Negara yang sedang dalam masa transisi menuju demokrasi berada dalam periode tidak stabil dan pada banyak hal tidak fungsional sehingga kehilangan kapasitas represif untuk menciptakan ketertiban. Karena itu, tahap transisi seringkali dianggap sebagai tahap yang diwarnai oleh ketidak-pastian dan dipenuhi oleh pergesekan antar berbagai kepentingan, termasuk berdasarkan kepentingan agama.³

B. MASYARAKAT MAJEMUK DAN KECENDERUNGAN KRITIS

Menurut Sofyan, terdapat tiga kecenderungan kritis yang selalu dihadapi oleh setiap anggota masyarakat majemuk sebagaimana Indonesia. *Pertama*, masyarakat majemuk mengidap konflik yang kronis dalam hubungan-hubungan antar kelompok. Walaupun dapat dicapai kompromi pada platform

tertentu, namun hal itu belum menutup kemungkinan pecahnya konflik lanjutan. Pela gandong sebagai bentuk kompromi di antara unsur-unsur masyarakat majemuk di Ambon misalnya, telah pecah menjadi konflik kekerasan yang mengerikan sejak Januari 1999.

Kedua, pelaku konflik cenderung memandang ketegangan dari perspektifnya sendiri, sehingga bukannya tidak mungkin ia melihat konflik sebagai gendang perang habis-habisan. Konflik bernuansa suku, agama, ras, dan antar-golongan, pada umumnya berhiaskan kecenderungan tersebut.

Ketiga, proses integrasi sosial ternyata lebih banyak terjadi melalui suatu dominasi ras atau suatu kelompok oleh kelompok lain, bukan didasarkan atas persamaan derajat.⁴

Salah satu konflik yang sering muncul paska runtuhnya Orde Lama adalah kerusuhan bernuansa etnis, antar-golongan maupun antar pemeluk-agama. Selain itu, juga terjadi bentrok fisik seperti penyerangan dan perusakan tempat-tempat ibadah. Kerusuhan di kota Semarang pada tahun 1912 merupakan contoh konflik yang melibatkan antar-umat beragama. Kerusuhan tersebut diawali dari kemarahan orang Islam terhadap

sekelompok orang Cina yang telah mengganggu dan menodai mushola dengan cara menabuh bunyi-bunyian dari kaleng ketika para jama\$'ah sedang melaksanakan shalat. Hal itu memancing kemarahan para jamaah dan menimbulkan ketegangan di antara dua belah pihak. Ketegangan semakin besar dan meledak menjadi kerusuhan dan kekerasan yang memakan korban ketika terjadi provokasi oleh kelompok orang Cina dengan melempar sepotong daging babi ke dalam mushola.

Walaupun skalanya tidak separah konflik Hindu-Islam di India, namun kenyataan itu sangat memperhatikan. Konflik antar-agama, ras, ataupun antar golongan tersebut bukan saja melukiskan pertentangan antar kelompok dalam memperebutkan sumber daya, namun juga telah menggeroti persaudaran, persatuan dan rasa kebangsaan. Konflik tersebut telah menelan banyak korban yang tidak berdosa. Namun, sayangnya selama rezim Orde Baru, konflik-konflik bernuansa SARA merupakan sesuatu yang ditabukan untuk diekspose sehingga tidak pernah terungkap secara tuntas.

Menurut laporan penelitian UNSFIR sebagaimana dikutip

Varshney, dalam kurun waktu 1990-2001 di 28 propinsi, terjadi insiden kekerasan kolektif sebanyak 4.270 kali dengan jumlah korban mencapai 11.160 orang meninggal. Dari 3.608 insiden dengan korban 10.758 orang yang terjadi di 14 propinsi pada kurun 1991-2003 tersebut, insiden kekerasan etno-komunal hanya terjadi sebanyak 599 kali atau 17%, namun menyebabkan kematian hampir 90% dari total korban jiwa. Ini berarti bahwa kekerasan kolektif dalam bentuk etno-komunal jarang terjadi, namun jika terjadi akan memakan korban yang lebih besar dibanding kekerasan bentuk lainnya.⁵

Kategori etno-komunal yang memakan banyak korban adalah konflik yang berkaitan dengan kerasan etnis, agama, dan sektarian. Dari 599 insiden konflik etno-komunal yang menyebabkan jatuhnya 9.612 tersebut, konflik berdasarkan agama khususnya Muslim-Kristen⁶, menduduki posisi tertinggi dengan 433 insiden dan menyebabkan jatuhnya korban 5.452 jiwa. Data Litbang Kompas dan Pelayanan Krisis dan Rekonsiliasi KWI tahun 1998-2003 juga menunjukkan betapa besarnya jumlah korban meninggal akibat kekerasan, yaitu 12.651 orang. Jumlah terbesar di Maluku Utara (3.244 orang) Aceh (2.929), Maluku (1.602), Jakarta

(1.190), Kalteng (817), dan Kalbar (688). Korban-korban tersebut, antara lain disebabkan oleh hilangnya keadaban publik saat kaum minoritas kesulitan menjalankan hak paling asasi untuk beribadah.

C. POLA DAN PENYEBAB KONFLIK ANTAR AGAMA DI INDONESIA

Walaupun konflik-konflik yang selama ini terjadi hanya bersifat lokal, namun beberapa di antaranya berdampak secara nasional. Menurut Taufik Abdullah, ada beberapa pola yang dapat diidentifikasi dari konflik tersebut, yaitu: *Pertama*, pola Situbondo, kejadiannya merupakan ketersinggungan rasa keagamaan. *Kedua*, pola Pekalongan, kejadiannya tentang sentimen tingkat kepemilikan asset ekonomi. *Ketiga*, pola Tanah Abang Jakarta, kejadiannya merupakan perlawanan terhadap perlakuan penguasa. *Keempat*, pola Sanggau Ledo Kalimantan Barat, kejadiannya merupakan persinggungan antar suku. *Kelima*, pola Timor-Timur kejadiannya menyangkut masalah integrasi.

Menurut Magenda, ada tiga sebab mengapa konflik agama Indonesia, terutama sejak tahun 1967 hingga akhir 1970-an sering terjadi. *Pertama*, karena diakuinya secara resmi agama-agama pada masa awal

Orde Baru. Akibat diakuinya secara resmi lima agama, terjadi proses intensifikasi penyebaran dan pendalaman agama, yang mempengaruhi hubungan antar pemeluk agama. Konflik sering terjadi karena seringkali sasaran penyebaran agama tersebut adalah mereka yang justru sudah beragama resmi.

Kedua, adanya internasionalisasi kehidupan beragama, termasuk penyebarannya. Tidak sebagaimana pada era Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin yang penyebaran agama dengan bantuan asing sangat dibatasi, sejak tahun 1966 mengalir deras bantuan-bantuan untuk untuk pengembangan semua agama dari luar negeri.

Ketiga, adalah konsekuensi dari hasil pembangunan Orde Baru itu sendiri. Di kalangan agama-agama, lahir kelas-kelas menengah baru di mana mereka ikut mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan. Maka, di sana-sini muncul kegiatan keagamaan yang semarak, baik yang bersifat fisik maupun ritual formal, berkat dukungan materi yang besar tersebut.⁷

Senada dengan itu, menurut Susetyo, salah satu penyebab rendahnya kualitas kerukunan antar-umat beragama di Indonesia adalah

masih terlalu simboliknya orientasi beragama yang dikembangkan masyarakat. Orientasi beragama yang hanya sekedar *to have religion* bukan *to be religion* disertai pemakaian agama sebagai alat legitimasi pemerintah, menyebabkan agama kehilangan jati diri dan nuraninya sebagai entitas pembawa kedamaian dan keadilan. Karena itulah perlu dikembangkan wacana komunikasi lintas agama sebagai upaya untuk saling memahami, meningkatkan kepercayaan sosial, dan merekatkan kohesi sehingga dapat menumbuhkan modal sosial yang sangat diperlukan dalam membangun masyarakat yang plural. Hal tersebut memang mudah untuk diucapkan namun bukan pekerjaan yang mudah untuk dilaksanakan. Terbukti dengan masih seringnya terjadi konflik bernuansa agama walaupun "proyek kerukunan antar umat beragama" sudah dilakukan pemerintah sejak tahun tujuh puluhan melalui Trilogi Kerukunan Beragama.

Konflik-konflik yang terjadi, apapun motifnya, telah membawa dampak yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat, memperlebar jurang pemisah sosial, melunturkan persaudaran, meninggalkan dampak psikologis yang sulit untuk dihilangkan, dan meluluh-lantakan modal sosial yang telah ada. Untuk itu, perlu

dicari mekanisme agar konflik dan kekerasan tidak berlanjut dan semakin banyak memakan korban.

D. MENINGKATKAN KOMUNIKASI LINTAS AGAMA: MODAL SOSIAL PEMBENTUKAN MASYARAKAT SIPIL

Salah satu jalan keluar yang paling banyak dilakukan untuk mengatasi konflik antarumat beragama selama ini adalah mediasi yang menekankan pada kesepakatan damai antar pemeluk agama. Namun, menurut Suwarno, cara mediasi tersebut kurang cocok untuk kondisi di Indonesia. Ini terbukti dari konflik-konflik yang terjadi berulang kali walaupun sudah ada kesepakatan damai. Hal ini bukan disebabkan adanya keengganan pihak-pihak yang berkonflik untuk saling berdamai, namun lebih dikarenakan rendahnya sikap saling pengertian dan terbatasnya komunikasi lintas agama. Karena itu, upaya yang lebih diperlukan untuk meminimalisir konflik antarumat beragama adalah usaha yang mengarah pada upaya saling memahami antar-kelompok agama yang berbeda. Hal itu dapat dilakukan melalui peningkatan komunikasi lintas agama sehingga menumbuhkan sikap saling percaya, melahirkan jaringan, dan membangun modal sosial untuk hidup bersama secara lebih baik dalam

masyarakat yang bercorak pluralistik.

Secara sosiologis, ada dua proses yang mempengaruhi perilaku kelompok secara mendalam dan menyeluruh. *Pertama*, integrasi sosial, yakni kecenderungan untuk saling menarik, tergantung dan menyesuaikan diri. *Kedua*, diferensiasi sosial, yakni kecenderungan ke arah perkembangan sosial yang berlawanan seperti perbedaan menurut ciri biologis manusia atau atas dasar agama, jenis kelamin, dan profesi.

Secara horizontal, dinamika integrasi sosial di suatu masyarakat mejemuk sangat ditentukan oleh dua hal; yakni konfigurasi dasar struktur sosial masyarakat berdasarkan parameter nominal; serta karakter hubungan antara berbagai parameter struktur sosial tersebut.

Parameter nominal seperti mayoritas-minoritas, barat-timur selalu menimbulkan gesekan-gesekan, yang jika tidak dapat dikompromikan akan menyebabkan pecahnya konflik. Seringkali terjadi, konflik yang semula berdimensi antar individu meningkat eskalasinya dengan adanya sentiment kolektif sehingga menimbulkan radikalitas pada suatu kelompok.

Sentimen kolektif disebabkan oleh banyak faktor. Alam, lingkung-

an, dan dianggap memiliki pengaruh yang kuat terhadap struktur sentiment kolektif sekelompok manusia. Penduduk agraris misalnya, dianggap memiliki karakter kejiwaan yang tenang, nrimo, mudah bergotong royong, dan gampang menerima orang lain. Berbeda dengan penduduk padang pasir yang dianggap mudah curiga akan orang asing sehingga untuk masuk ke lingkungan mereka orang asing perlu meyakinkan mereka bahwa ia bukan musuh dan tidak membawa senjata.

Setiap masa melahirkan corak sentimen kolektif hasil dari faktor yang beragam dan perbedaan ruang dan waktu. Situasi dan kondisi telah menciptakan struktur dan budaya tersendiri bagi generasi-generasi manusia. Pada akhirnya, sentimen kolektif memiliki hubungan yang sangat erat dengan sistem nilai dan ide suatu masyarakat yang selalu berubah sesuai situasi dan kondisi.⁸

Konflik, kerusuhan dan peperangan terkadang juga lahir karena sentiment kolektif sekelompok pengikut agama atau aliran keagamaan karena kebencian dan kedengkian. Kasus berlarutnya konflik di Poso maupun di Ambon, antara lain juga ditengarai oleh adanya sentiment kolektif keagamaan tersebut. Dengan alasan untuk

membela saudara-saudara seagama atau seimannya, kelompok-kelompok tertentu dari luar wilayah konflik masuk dan ikut memperkeruh suasana yang sudah kacau. Demikian pula keterlibatan pihak keamanan yang tidak netral karena cenderung kelompok yang seagama dengannya.

Dalam kaitannya dengan agama negara, terdapat beberapa perbenturan peran yang menyebabkan munculnya dilemma etis. *Pertama*, eksklusivisme agama. Walaupun negara mengakui adanya pluralitas dan memenuhi harapan semua kelompok yang eksis, namun masih terdapat harapan-harapan yang tidak terakomodasikan. Hal ini menyebabkan munculnya ketidakpuasan karena negara dianggap kurang cukup akomodatif terhadap kelompok tertentu dan terlalu mengistimewakan kelompok lainnya.

Kedua, puritanisme agama. Ketika negara dirasakan semakin sekuler semangat puritanisme akan meningkat dan mencoba melepaskan diri dari kesatuan masyarakat pada umumnya. Hal tersebut menyebabkan mereka semakin eksklusif dan loyalitasnya pada negara semakin tipis.

Ketiga, dilemma yang muncul dari kuatnya rasa solidaritas umat beragama di seluruh dunia. Bila

kebijakan negara tidak mewakili harapan kelompok masyarakat yang mendapat dukungan solidaritas global, maka akan terjadi dilemma loyalitas.

Keempat, dilemma soal kepatuhan. Baik negara maupun agama sama-sama memiliki legitimasi, hak, dan kewajiban untuk menuntut kepatuhan yang sifatnya mutlak atas individu. Jika negara memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan norma-norma agama, maka akan terjadi dilemma kepatuhan.

Kelima, dilemma wewenang idiologis. Idiologi adalah dogma yang menuntut kepatuhan dan kepercayaan, padahal di sisi lain, kepercayaan adalah wewenang khas agama. Jika di antara ideologi dan agama tidak bisa sinkron, maka akan terjadi benturan yang kronis sehingga memunculkan gerakan bercirikan separatisme. Pemberontakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia, Gerakan Rakyat Maluku Selatan, dan Gerakan Aceh Merdeka adalah beberapa contoh yang menunjukkan adanya dilemma wewenang idiologis.

Mengamati berbagai fenomena konflik antar umat beragama, dapat ditemukan setidaknya-tidaknya tiga titik api sebagai pemicu persoalan. *Pertama*, menyangkut penghampiran idiologi terhadap ajaran dan nilai-nilai

agama. Agama menjadi dogmatis, kemudian penuh dengan penafsiran yang harus ditaati, sehingga muncul gerakan fundamentalisme dan puritanisme. Kekecewaan yang berlarut akan menjadikan mereka semakin fundamentalis dengan fanatisme keagamaan yang relatif sempit. Ketertutupan mereka terhadap dialog-dialog mencari kebenaran Illahi sesuai konteks kehidupan masa sekarang akan membuat situasi bagaikan 'bara dalam sekam.' yang akan meledak jika dipaksa berdialog dengan unsur masyarakat lain yang tidak sama pendiriannya.

Kedua, diseretnya agama secara paksa untuk memasuki wilayah kepentingan pemeluknya, yang seringkali bersifat parsial dan menguntungkan kelompok tertentu. Menurut Berger, agama merupakan alat legitimasi yang paling efektif sehingga sering dipakai sebagai jubah untuk memperjuangkan kepentingan tertentu, termasuk politik.

Ketiga, kebenaran Illahiah pada setiap agama merupakan peniup iklim yang destruktif. Semua mengunggulkan agamanya masing-masing sebagai yang paling suci, agung, dan benar.

Pada dasarnya konflik antar umat beragama lebih disebabkan

oleh ambiguitas sikap dan keserakahan manusia. Pemahaman yang tidak dilakukan secara terbuka terhadap nilai esensial fundamental agama banyak melahirkan distorsi. Akibatnya agama nampak sebagai pemicu konflik, padahal esensi agama adalah rangkaian solusi untuk menemukan problem-problem manusia baik dalam dimensi duniawi maupun akherati.⁹

Sejak meluasnya gelombang demokratisasi pada dekade 1970-an yang berhasil meruntuhkan tembok-tembok otoritarianisme di berbagai belahan dunia, demokrasi muncul sebagai idiologi yang diyakini sebagai pilihan terbaik untuk menjamin hak asasi manusia di satu sisi dan memelihara integrasi negara-negara di pihak lain. Demokrasi dianggap sebagai pilihan ideal untuk menemukan tatanan kehidupan negara bangsa yang jauh dari kekerasan di tengah pluralisme identitas budaya.

Bagi bangsa Indonesia, pluralisme adalah realitas yang tidak dapat diingkari dengan melihat banyaknya penduduk yang mendiami puluhan ribu kepulauan, menggunakan banyak bahasa ibu, beragamnya agama dan kepercayaan yang ada, etnis, budaya, dan stratifikasi sosial yang berimplikasi

pada beragamnya kepentingan. Perbedaan-perbedaan tersebut menuntut kita untuk mau dan harus hidup bersama dalam perbedaan, menjalin kerjasama dan saling mendukung untuk menciptakan bangsa yang kuat.

Pada masa Orde Baru, untuk mengeliminir konflik yang mungkin muncul sebagai akibat banyaknya perbedaan, pemerintah melakukan kebijakan penyeragaman dalam berbagai aspek, termasuk agama. Melalui serangkaian peraturan pemerintah, rezim yang berkuasa memaksa masyarakat yang memang berbeda dalam banyak hal, untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan yang ada demi stabilitas nasional. Akibatnya, kebebasan individu dan kelompok sangat dibatasi sehingga memiskinkan kreativitas masyarakat dalam menghadapi persoalan-persoalan yang muncul. Strategi pemerintah tersebut terbukti kurang tepat karena stabilitas yang dihasilkan hanyalah bersifat semu. Konflik-konflik yang ada disembunyikan dari permukaan, bukannya dicari pemecahannya. Akibatnya muncul situasi seperti bara dalam sekam, di mana konflik tersebut sewaktu-waktu dapat terjadi dan membakar begitu ada pemicu yang memungkinkan. Itu terbukti dari tak terkendalinya kerusuhan dan kekerasan dalam

masyarakat begitu rezim Orde Baru mulai goyah dan terancam hancur.

Hal tersebut masih berlangsung sampai saat ini di mana di tengah masa transisi menuju demokrasi yang seharusnya mengedepankan musyawarah, dialog bebas dan setara ternyata masih disertai dengan budaya mau menang sendiri, pemaksaan kehendak dan anarkisme. Situasi ini semakin mempersulit usaha membangun masyarakat Indonesia yang adil-makmur sebagaimana yang dicita-citakan pendiri bangsa.

Kehidupan demokrasi yang dipromosikan mampu mengangkat kehidupan masyarakat lebih baik oleh kaum reformasi setelah berhasil menjatuhkan rezim otoriter Soeharto pada tahun 1998 sampai saat ini belum menampakkan tanda-tanda akan terwujud. Justru yang terjadi sebaliknya, kehidupan berbangsa ditandai oleh meningkatnya konflik elit dan konflik fisik pada masyarakat lapisan bawah. Konflik Muslim-Kristen di Poso, Maluku dan Ambon, kekerasan etnis di Sampit, terorisme, pengeboman di Jakarta, Ambon dan Bali, pembakaran dan penyerangan tempat ibadah di berbagai daerah mewarnai transisi dari rezim otoriter ke demokrasi. Peristiwa-peristiwa tersebut bukan saja memakan korban

fisik dan harta benda namun juga mengakibatkan puluhan ribu jiwa melayang. Hal ini sangat kontradiktif dengan klaim penggiat demokrasi yang sangat yakin bahwa demokrasi merupakan pintu menuju kehidupan yang damai dan sejahtera di tengah pluralisme yang ada.

Salah satu sebab munculnya kekerasan atas nama agama adalah dominannya aspek normatifitas ajaran agama yang dipegang teguh oleh para pemeluknya. Terlalu dipegang teguhnya aspek normatifitas dan diabaikannya dimensi historisitas dari keberagaman seseorang atau kelompok memang tidak begitu menjadi masalah pada masyarakat yang bersifat homogen secara keagamaan. Namun pada masyarakat yang heterogen, sebagaimana Indonesia, hal itu dapat menimbulkan konflik yang memicu kekerasan antar umat beragama.

Banyaknya konflik bernuansa keagamaan yang terjadi di berbagai belahan dunia menyebabkan banyak pihak yang mengabaikan peran agama dalam masyarakat modern, bahkan menganggap agama bertentangan dengan nilai-nilai yang ada pada masyarakat modern. Pemikiran tersebut, menurut Hikam, kebanyakan didasarkan pada pemikiran dikotomis Weber yang

mempertentangkan antara kesadaran keagamaan versus kesadaran rasional. Menurut Weber, gerakan keagamaan umumnya dilihat dalam bentuk reaksi melawan modernitas, dan akibatnya, para pengamat seringkali gagal memperhitungkan sumbangan politik mereka terhadap pertumbuhan masyarakat sipil.

Dalam kehidupan masyarakat modern yang pluralistik, masyarakat sipil merupakan agen penting untuk membatasi pemerintah otoriter, memperkuat pemberdayaan rakyat, mendorong perubahan dan mendesakkan demokratisasi. Putnam melalui studi komparatifnya tentang efektivitas pemerintahan daerah di Italia Utara dan Selatan menunjukkan bukti bahwa "jaringan kerja keterlibatan sipil" yang dikembangkan oleh "asosiasi-asosiasi sipil" berpengaruh terhadap keberhasilan demokrasi. Putnam berargumentasi bahwa desentralisasi menumbuhkan modal sosial dan tradisi kewargaan. Partisipasi demokratis warga telah meningkatkan komitmen warga maupun hubungan-hubungan horizontal seperti kepercayaan, toleransi, kerjasama, dan solidaritas yang membentuk komunitas sipil.

Asosiasi-asosiasi sipil telah membuka kesempatan kepada anggota-anggota masyarakat untuk

semakin mengintensifkan komunikasi dan membentuk pengertian bersama. Sebagaimana diungkapkan Patrick Wilson, demokrasi adalah komunikasi dalam ruang publik yang beradab di mana orang dapat saling berbicara dalam masalah bersama, membentuk nasib bersama. Dan nasib bersama itu adalah terlindunginya warga negara dari kekerasan, ancaman, dan state terorism. Hal ini sejalan dengan pandangan Jurgen Habermas yang menekankan pentingnya tindakan komunikatif bagi tegaknya demokrasi. Bagi Habermas sebagaimana dikutip Purnomo, proses demokrasi sebenarnya merupakan aktualisasi tindakan komunikatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ia menekankan, berbicara adalah tindakan dan perbuatan yang menumbuhkan saling pengertian tentang aneka kondisi yang mengatur tindakan bersama sehingga hidup bersama yang adil dan sejahtera menjadi mungkin. Itulah komunikasi yang beradab.¹⁰

Untuk dapat berlangsungnya komunikasi yang beradab, masing-masing partisipan yang terlibat di dalamnya harus mau saling membuka diri, menghargai pihak lain, dan mengembangkan sikap saling percaya. Tanpa itu, maka komunikasi akan banyak mengalami hambatan bahkan tidak mustahil mendatangkan

konflik.

Dalam kaitannya dengan konflik antar umat beragama, sangat dimungkinkan salah satu faktor penyebabnya adalah kurangnya komunikasi dan saling pengertian dikarenakan kebijakan pemerintah yang membuat sekat-sekat di antara komunitas-komunitas keagamaan yang ada. Sebagaimana dikatakan Hikam, selama orde baru agama dan komunitas keagamaan berada dalam posisi defensif berhadapan dengan kekuasaan negara dan hegemoni ideologisnya. Begitu hegemoniknya pemerintah dan lemahnya komunitas keagamaan menyebabkan sebagian besar organisasi keagamaan menarik diri dari kegiatan politik dan mengalihkan perhatiannya pada kegiatan sosial, seperti pendidikan dan dakwah. Kepemimpinan agama juga melemah, dan sebagian di antara bahkan telah dikooptasi oleh negara sehingga tidak berani kritis lagi. Jika pun ada gerakan yang mencoba mengimbangi hegemoni negara bisa dipastikan tidak berumur panjang karena pasti segera 'diberangus' oleh penguasa orde baru.

Menyadari keadaan tersebut, beberapa aktivis dan tokoh-tokoh agama mencoba menggeser arah perjuangan melalui redefinisi peranannya dalam upaya mengem-

bangkan masyarakat sipil. Menurut pemikiran ini, gerakan keagamaan tidak harus diarahkan pada penguasaan politik namun dapat menegakkan perjuangan demi keadilan sosial dalam masyarakat sipil. Munculnya lembaga-lembaga swadaya masyarakat berbasiskan keagamaan ataupun lintas agama diharapkan dapat menjadi motor bagi upaya-upaya pemerkuatan sosial. Gerakan-gerakan tersebut harus mampu menawarkan alternatif yang lebih baik bagi masyarakat luas, bukan hanya untuk komunitasnya sendiri. Karena itu, komunitas-komunitas berbasiskan agama harus bersifat inklusif, demokratis, toleran, dan damai. Dengan keempat ciri tersebut, maka mereka harus menerima dan menghargai pluralitas agama dan budaya. Sikap yang harus dikembangkan bukanlah memonopoli kebenaran, namun sikap saling menghargai dan menghormati. Kurang berkembangnya keterbukaan inilah yang seringkali mengakibatkan munculnya sikap terlalu mementingkan kelompoknya sendiri dan menganggap kelompok lainnya yang tidak sejalan sebagai "musuh" yang harus dihadapi.

E. PENUTUP

Pluralitas adalah sunatullah, keragaman merupakan relaitas yang

tidak terbantahkan. Pluralitas dan keragaman - sosial, budaya, politik, maupun agama- dalam masyarakat merupakan kekayaan suatu bangsa. Namun, di samping bernilai positif, pluralitas juga dapat berdampak negatif jika tidak dapat dikelola dengan baik. Hal tersebut telah terbukti dengan terjadinya banyak konflik berbasiskan perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat. Salah satu konflik yang banyak membawa korban adalah konflik agama, baik sesama pemeluk agama yang sama ataupun yang melibatkan pemeluk antar-agama.

Sangat sulit untuk mengharapkan peran pemerintah semata-mata dalam mengatasi konflik antar kelompok, termasuk kelompok-kelompok agama dalam masyarakat. Karena, alih-alih sebagai penengah konflik, pemerintah seringkali justru muncul sebagai sumber konflik dan berusaha melanggengkan konflik antar kelompok tersebut demi kepentingan kekuasaan. Karena itu, masyarakat harus meningkatkan dan mengintensifkan komunikasi di antara komunitas-komunitas keagamaan yang ada.

Jika komunitas-komunitas keagamaan dapat mengembangkan sikap keterbukaan, demokratik, toleran, dan damai maka peran

mereka dalam mengembangkan masyarakat sipil akan semakin meningkat karena mereka telah menanam benih-benih modal sosial yang diperlukan bagi terciptanya masyarakat sipil.

Catatan:

¹Faisal Ismail, "Keteladanan dalam Konteks Kepemimpinan Nasional dan Realitas Kemajemukan Bangsa", *UNISIA* No. 52/XXVII, 2004.

² Suharman, "Beberapa Masalah Kerukunan Suku: Kasus Pembakaran Pasar Abepura, Irian Jaya", dalam Mahfud MD (ed.), *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*, edisi revisi, Yogyakarta: Kanisius, 1997.

³ Vermonte, Philips J. dan Hikmat Budiman (ed.), "Pemilu dan Konflik, Civic Engagement" dalam *Pemilu: Kasus Empat Daerah Pasca Konflik*, Jakarta: Interseksi, 2004.

⁴ M. Sofyan, *Agama dan Kekerasan dalam Bingkai Reformas*, Media Yogyakarta: Pressindo, 1999, hlm. 2-3.

⁵ Varshney, Ashutosh, Rizal Panggabean dan Muhammad Zulfan Tadjoeddin, *Pola Kekerasan Kolektif di Indonesia (1990-2003): Laporan Penelitian UNSFIR-04/03*, Jakarta: UNSFIR, 2004.

⁶ Menurut Fridus Steijlen, istilah konflik Muslim-Kristen masih perlu diklarifikasi lebih lanjut karena walaupun pihak yang terlibat dalam konflik melibatkan kelompok muslim dan kristen sebagaimana di Maluku misalnya, namun masyarakat sendiri tidak yakini konflik tersebut sebagai konflik agama. Tidak ada perselisihan agama ataupun teologi yang menyebabkan terjadinya konfli tersebut Secara esensial, konflik Maluku merupakan satu konflik antara kelompok social yang terlibat dalam pergulatan perebutan kekuasaan politik dalam lebih dari satu tingkatan social tertentu; J. Gunawan, Sutoro Eko Y, Anton Birowo, dan Bambang Purwanto, *Desentralisasi, Globalisasi dan Demokrasi Lokal*, Jakarta: LP3ES, 2005, hlm. 112 – 113.

⁷ Burhan D. Magenda, "Perubahan dan Kesenambungan dalam Pembelaan Masyarakat Indonesia", *Prisma*, No. 4, 1990.

⁸ *Ibid.*

⁹ M. Sofyan, *Agama dan Kekerasan*, hlm. 19-21.

¹⁰ Aloys Budi Purnomo, "Republik Tuna Adab", *Kompas*, Desember 2005.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan, "Indonesia Abad XXI di Tengah Kepungan Perubahan Global", *Kompas*, 2000.
- Baso, Ahmad, "Diskriminasi agama di Balik RUU KUB", dalam *Basis No. 01-02*, tahun ke-53, 2004.
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckman, *The Social Construction of Reality: a Treatise in the Sociology of Knowledge*. Diterjemahkan oleh Basari Hasan, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Sebuah Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan (1996)*, Jakarta: LP3ES, 1990.
- Bogdan, Robert C. and Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Method*, Boston: John Wiley and Sons, 1975.
- Bungin, Burhan, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Eriyanto, *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*, Yogyakarta: LKiS, 2003
- Faqih, Mansoer, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Faruk, "Kritik Terbuka: Sebuah Imperatif Budaya", dalam Mahfud MD (ed.), *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*, edisi revisi, Yogyakarta: UII-Press, 1999.
- Fisher, B. Aubrey, *Teori-teori Komunikasi*, penerjemah Soejono Trimo, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986.
- Ghazali, Effendy, "Budaya Pertelevisian Indonesia: Studi dengan Perspektif Interaksionisme Simbolik", dalam *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, Vol. I., 1998.
- Griffin, EM., *A First Look at Communication Theory*, 5 th edition, New York: Mc Graw Hill, 2003.
- Gunawan, J., Sutoro Eko Y, Anton Birowo dan Bambang Purwanto, *Desentralisasi, Globalisasi dan Demokrasi Lokal*, Jakarta: LP3ES, 2005.
- Harsono, A. (Peny.), *Huru-Hara Rengasdengklok*, Jakarta: ISAI, 1997.

- Hidayat, Dedy N., "Paradigma dan Perkembangan Penelitian Komunikasi", *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, Vol. III., 1999.
- Hikam, Muhammad A.S., "Bahasa dan Politik: Penghampiran Discursive Practice", dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim (ed.), *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*, Bandung: Mizan, 1996.
- Institut Research and Empowerment, *Annual Report 2001-2002: Desentralisasi dan Demokrasi Lokal*, Yogyakarta: IRE, 2003.
- Ismail, Faisal, "Keteladanan dalam Konteks Kepemimpinan Nasional dan Realitas Kemajemukan Bangsa", *UNISIA* No. 52/XXVII, 2004.
- Kasiyanto, "Informasi Realitas sebagai Bentuk Reformasi Pemberitaan Media Massa: Sebuah Apresiasi Masyarakat Desa", *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, Vol. IV, 1999.
- Kuntowijoyo, *Islam Sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Jakarta: Teraju, 2005.
- Littlejohn, Stephen W. and Karen A. Foss, *Theories of Human Communication*, 7th Edition, California: Wadsworth Publishing Company, 2005.
- Magenda, Burhan D., "Perubahan dan Kesenambungan dalam Pembelaan Masyarakat Indonesia", *Prisma*, No. 4, 1990.
- Mulyana, Deddy, "Kendala-Kendala Pengembangan Penelitian Komunikasi di Indonesia", *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, Vol. III, 1999.
- Mulyana, Deddy, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Poloma, Margaret M., *Sosiologi Kontemporer*, penerjemah tim Penerjemah Yasogama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Purnomo, Aloys Budi, "Republik Tuna Adab", *Kompas*, Desember 2005.
- Sofyan, M., *Agama dan Kekerasan dalam Bingkai Reformas*, Media Yogyakarta: Pressindo, 1999.
- Strauss, Anselm, *Qualitative Analysis for Social Scientists*, Cambridge: Cambridge University Press, 1990.

Suharman, "Beberapa Masalah Kerukunan Suku: Kasus Pembakaran Pasar Abepura, Irian Jaya", dalam Mahfud MD (ed.), *Kritik Sosial dalam Wacana Pembangunan*, edisi revisi, Yogyakarta: Kanisius, 1997.

Varshney, Ashutosh, Rizal Panggabean dan Muhammad Zulfan Tadjoeeddin, *Pola Kekerasan Kolektif di Indonesia (1990-2003): Laporan Penelitian UNSFIR-04/03*, Jakarta: UNSFIR, 2004.

Vermonte, Philips J. dan Hikmat Budiman (ed.), *Pemilu dan Konflik, Civic Engagement dalam Pemilu: Kasus Empat Daerah Pasca Konflik*, Jakarta: Interseksi, 1990.

Zen, Fathurin, *NU Politik: Analisis Wacana Media*, Yogyakarta: LKiS, 2004.